



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 63 Tahun 2023

TENTANG
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 182);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004 tentang

Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-Government*);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 321);
14. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Dan Birokrasi Nomor 962 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Nomor 253 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, Nomor 253).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023-2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
7. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
8. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
10. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
11. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
12. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya
13. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.
14. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
15. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE
16. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di Kementerian Koordinator
17. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan

secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah

18. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.
19. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
20. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
21. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
22. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
23. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
24. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
25. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
26. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peta Rencana SPBE Kabupaten Purwakarta disusun dengan maksud memberikan arah dan dan tahapan, serta program/ kegiatan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Peta Rencana SPBE Kabupaten Purwakarta bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana dan Anggaran Tahunan SPBE Kabupaten Purwakarta yang dilakukan dalam waktu 5 tahun. Dengan demikian tahapan, program/ kegiatan SPBE Kabupaten Purwakarta dapat berjalan sistematis dan terukur.

BAB III
PETA RENCANA SPBE

Pasal 3

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Selain berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Arsitektur SPBE memperhatikan Arsitektur SPBE Provinsi Jawa Barat

Pasal 4

- (1) Sistematika Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;

- f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistematika Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan rencana strategis Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta
- (4) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.

Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

REVIU

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan reviu Peta Rencana SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;

- b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi.
- (4) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 7 Maret 2023


BUPATI PURWAKARTA,
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
NORMAN NUGRAHA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 63 Tahun 2023
TANGGAL : 7 MARET 2023
TENTANG : PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023-
2027

PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023-2027

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan SPBE, salah satu kewajiban Pemerintah Daerah adalah menyusun dan menetapkan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah peyiapan dan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah yang terintegrasi. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana dan Anggaran Tahunan SPBE Pemerintah Daerah.

Peta Rencana SBPE Daerah disusun atas dasar Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah memuat aspek Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta, sebagai salah satu Pemerintah Daerah, telah menyusun dan menetapkan Peta Rencana SPBE ini, yang selanjutnya disebut sebagai Peta Rencana SPBE Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 - 2027.

B. Maksud dan Tujuan

Peta Rencana SPBE Kabupaten Purwakarta tahun 2023 – 2027 disusun dengan maksud memberikan arah dan tahapan, serta program/ kegiatan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023 - 2027.

Peta Rencana SPBE Kabupaten Purwakarta tahun 2023 – 2027 bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana dan Anggaran Tahunan SPBE Kabupaten Purwakarta tahun 2023 - 2027. Dengan demikian tahapan, program/ kegiatan SPBE Kabupaten Purwakarta dapat berjalan sistematis dan terukur.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Peta Rencana SPBE Kabupaten Purwakarta, yaitu:

1. Arah dan Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan, sesuai dengan Visi SPBE Kabupaten Purwakarta yang telah dirumuskan di dalam Arsitektur SPBE Kabupaten Purwakarta tahun 2022 – 2026.

2. Program/ Kegiatan, yang mencakup 7 (tujuh) aspek SPBE, yaitu: Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK. Pada bagian ini juga dicantumkan index SPBE Kabupaten Purwakarta tahun 2023 – 2027.

D. Referensi

Peta Rencana SPBE Kabupaten Purwakarta disusun atas dasar referensi berikut ini:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Bupati Nomor : 253 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Purwakarta.
5. Arsitektur SPBE tahun 2022 - 2026

BAB II
ARAH DAN TAHAPAN PELAKSANAAN
SPBE KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 – 2027

A. Arah SPBE Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 - 2027

Sesuai dengan amanat dari RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018– 2023 yang diturunkan lebih lanjut di dalam Arsitektur SPBE Kabupaten Purwakarta tahun 2022 – 2026, arah dari SPBE Kabupaten Purwakarta tahun 2023 – 2027 adalah untuk mewujudkan visi SPBE Kabupaten Purwakarta tahun 2023 – 2027, yaitu: “Mewujudkan Purwakarta Istimewa” Beberapa kata kunci yang ditekankan pada bidang Komunikasi dan Informatika , yaitu Pengelolaan urusan Bidang Komunikasi dan Informatika menitikberatkan pada upaya meningkatkan penyediaan informasi pembangunan, keterbukaan informasi publik serta peningkatan sarana komunikasi dan infomatika yang mudah diakses dan diperoleh masyarakat. Dalam pelaksanaan komunikasi dan penyampaian informasi publik pada masa kini harus dituntut serba cepat, akurat dan mudah diakses oleh semua pihak, mengingat perkembangan komunikasi dan informasi public pada masa kini berkembang sangat pesat dan dinamis, oleh karena diperlukan teknologi dan informasi yang unggul dan terkini serta media sarana komunikasi yang efektif dan cepat dalam penyampaian informasi publik tersebut. Kebijakan pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta diarahkan untuk meningkatkan penyebaran informasi pembangunan. Keterbatasan dan keterisoliran suatu daerah dalam lingkup suatu wilayah dalam menyerap informasi pembangunan dapat berakibat Kurang baik bahkan dapat menimbulkan ekses yang negalit bukan hanya bagi daerah itu sendi melainkan dalam lingkup yang lebih luas dalam sebuah wilayah.

Di jabarkan dalam point-point penting terkait dengan hal-hal berikut:

1. Integrasi. Ini merupakan semangat kunci yang utama yang dibawa di dalam penyelenggaraan SPBE. Integrasi berarti meningkatkan

keterhubungan sehingga sistem yang dulunya terpisah-pisah, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bekerjasama dan berkolaborasi mencapai satu tujuan utama.

2. Proses dan Data. Dua komponen utama yang perlu dilakukan integrasi. Integrasi proses menyatakan bahwa seluruh rangkaian proses perlu diperhatikan secara end-to-end, suatu rangkaian yang saling terhubung. Integrasi data membawa semangat 'Satu Data' untuk menjaga integritas data.
3. SPBE yang Efektif. Artinya adalah SPBE dapat berjalan dengan maksimal melalui pemanfaatan TIK dan melalui integrasi proses dan data. Efektif di sini artinya dapat mengantarkan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan dan peran yang sudah didefinisikan sebelumnya.
4. Layanan Publik dan Kinerja Aparatur. Mencakup dua aspek yang dituju di dalam audience SPBE. Secara internal akan membantu dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, sedangkan untuk eksternal kepada masyarakat akan sangat membantu dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Untuk dapat mencapai visi tersebut, ada beberapa misi yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengintegrasikan seluruh komponen TIK untuk setiap proses dalam siklus hidup TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Integrasi mencakup integrasi internal (intra) maupun integrasi eksternal (antar Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan Instansi Pusat, dan dengan Pemerintah Daerah lainnya, khususnya Pemerintah Daerah Tingkat I / Provinsi Jawa Barat)
2. Meningkatkan kompetensi dan distribusi SDM TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
3. Menetapkan landasan hukum/kebijakan/regulasi serta tata kelola terkait dengan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
4. Meningkatkan layanan publik dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan SPBE untuk menuju Purwakarta Smart City.

B. Tahapan Pelaksanaan SPBE Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 - 2027
Untuk mencapai visi dan misi SPBE Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2023 – 2027, disusun langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tahap 1 Penguatan Kelembagaan dan Manajemen SPBE

Tahapan ini dilaksanakan pada tahun 2023. Program/ Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahapan ini, antara lain:

1. Penguatan aspek Kelembagaan, mencakup: reviu dan update peraturan/ kebijakan yang terkait dengan SPBE, sehingga selaras dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Peraturan/ kebijakan yang dimaksud antara lain: tata kelola TIK menjadi penyelenggaraan SPBE (termasuk kebijakan internal SPBE), Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE. Selain itu juga mereviu dan update perangkat pelaksana SPBE, yaitu: Tim Koordinasi SPBE dan Tim Asesor SPBE.
2. Penguatan aspek Manajemen, mencakup: reviu dan update pedoman-pedoman yang terkait dengan penyelenggaraan SPBE sehingga selaras dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Instansi Pusat terkait. Pedoman-pedoman ini juga disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Tahap 2 Optimasi Integrasi dan Peningkatan Kapasitas Layanan SPBE

Tahapan ini dilaksanakan pada tahun 2023-2024. Program/ Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahapan ini, antara lain:

1. Optimasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), mencakup: SPLP Internal dan SPLP Eksternal. SPLP Internal untuk meningkatkan integritas data, aplikasi dan layanan SPBE intra Pemerintah Kabupaten Purwakarta, yang menghubungkan semua sistem TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. SPL Eksternal untuk meningkatkan integritas data, aplikasi dan layanan yang terhubung dengan Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah lain, khususnya Pemerintah Daerah Tingkat I/ Provinsi Jawa Barat.

2. Optimasi Integrasi Data, melanjutkan integrasi master data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, untuk mewujudkan 'satu data' Kabupaten Purwakarta.
3. Optimasi Integrasi User Management, melanjutkan integrasi user management yang mencakup user aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Purwakarta, user masyarakat (citizen) dan user badan hukum (baik badan hukum komersial maupun non komersial) yang menjadi target Layanan SPBE Kabupaten Purwakarta.
4. Perluasan dan Integrasi Keamanan SPBE, melanjutkan penerapan standar keamanan sehingga mencakup seluruh komponen SPBE Kabupaten Purwakarta.
5. Optimasi Integrasi Aplikasi, optimasi integrasi internal diwujudkan dalam bentuk Super App yang memudahkan penggunaan Layanan SPBE yang didukung oleh aplikasi - aplikasi SPBE Kabupaten Purwakarta.
6. Melanjutkan pendaftaran Aplikasi ke Kemenkominfo, aplikasi-aplikasi telah dikembangkan/ dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta didaftar ke repositori aplikasi di Kemenkominfo untuk mendukung program berbagi pakai aplikasi dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya TIK, melalui perencanaan kapasitas sumber daya TIK sesuai dengan kebutuhan peningkatan Layanan SPBE Kabupaten Purwakarta, serta meningkatkannya untuk mencapai layanan optimal. Sumber daya TIK ini mencakup aspek teknologi (termasuk teknologi mobile dan IoT) dan sumber daya manusia (melalui peningkatan kompetensi).

Tahap 2 Layanan Prima SPBE

Tahapan ini diharapkan dapat tercapai pada 2023-2027. Program/ Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahapan ini, antara lain:

1. Evaluasi dan Optimasi Layanan Publik SPBE, atas dasar integritas data, aplikasi, dan layanan, maka diharapkan dapat tercapai layanan publik SPBE yang prima. Layanan-layanan publik ini dievaluasi dan dioptimasi sehingga dapat memenuhi harapan tersebut.

2. Evaluasi dan Optimasi Layanan Administrasi Pemerintahan SPBE, atas dasar integritas data, aplikasi, dan layanan, maka diharapkan dapat tercapai layanan administrasi pemerintahan SPBE yang prima. Layananlayanan administrasi ini dievaluasi dan dioptimasi sehingga dapat memenuhi harapan tersebut.

Dengan dilaksanakannya ketiga tahapan tersebut, diharapkan bahwa visi dari SPBE Kabupaten Purwakarta dapat terwujud

BAB III
PROGRAM/ KEGIATAN SPBE
KABUPATEN PURWAKARTATAHUN
2023 – 2027

Sesuai dengan tahapan pelaksanaan SPBE pada pada Bagian II, pada bagian ini diuraikan detail program/ kegiatan, keluaran, pelaksana dan indikator tahunan SPBE Kabupaten Purwakarta. Program/ Kegiatan dikelompokkan ke dalam 7 Aspek Penyelenggaraan SPBE.

A. Program/ Kegiatan SPBE Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 – 2027

Program/ Kegiatan Aspek 1 Tata Kelola SPBE dapat dilihat pada tabel III.1.

Kegiatan mencakup:

- 1.1. Reviu dan Update Kebijakan Peraturan Bupati Terkait dengan Peraturan SPBE (include Kebijakan Internal SPBE Kabupaten Purwakarta)
- 1.2. Reviu Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Purwakarta
- 1.3. Reviu Pembentukan Tim Asesor Internal SPBE Kabupaten Purwakarta.
- 1.4. Penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Purwakarta
- 1.5. Penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Purwakarta
- 1.6. Reviu Kebijakan SPBE Kabupaten Purwakarta
- 1.7. Asesment Internal SPBE Kabupaten Purwakarta

Program/ Kegiatan Aspek 2 Manajemen SPBE Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel III.2. Kegiatan mencakup:

- 2.1. Penyusunan Pedoman Manajemen SPBE Kabupaten Purwakarta (risiko, keamanan informasi, data, aset teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, dan layanan)
- 2.2. Implementasi Manajemen SPBE
- 2.3. Evaluasi Manajemen SPBE
- 2.4. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Manajemen SPBE

Tabel III.1 Program/ Kegiatan Aspek 1 Tata Kelola SPBE Kabupaten Purwakarta 2023 – 2027

No	Uraian Program/ Kegiatan	Keluaran	Tahun					Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027	
1	Tata Kelola SPBE Kabupaten Purwakarta							
1.1	Reviu dan Update Kebijakan Peraturan Bupati Terkait dengan Peraturan SPBE (include Kebijakan Internal SPBE Kabupaten Purwakarta)	Perbup SPBE						Diskominfo & Serda (Bagian Hukum)
1.2	Reviu Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Purwakarta	SK Tim						Diskominfo & PD
1.3	Reviu Pembentukan Tim Asesor Internal SPBE Kabupaten Purwakarta.	SK Tim						Diskominfo & PD
1.4	Penyusunan Arsitektur Kabupaten Purwakarta	Arsitektur SPBE						Diskominfo & Seluruh PD
1.5	Penyusunan Peta Rencana Kabupaten Purwakarta	Perbup Peta Rencana SPBE Kabupaten Purwakarta						Diskominfo & Seluruh PD
1.6	Reviu Kebijakan SPBE Kabupaten Purwakarta	Laporan Hasil Reviu						Tim Koordinasi SPBE
1.7	Asesment Internal SPBE Kabupaten Purwakarta	Laporan Hasil Reviu						Tim Koordinasi SPBE

No	Uraian Program / Kegiatan	Keluaran	Tahun					Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027	
1	Manajemen SPBE Kabupaten Purwakarta							
2.1	Penyusunan Pedoman Manajemen SPBE Kabupaten Purwakarta (risiko, keamanan informasi, data, aset teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, dan layanan)	Dokumen Pedoman Manajemen SPBE Kabupaten Purwakarta						Diskominfo & Seluruh PD
2.2	Implementasi Manajemen SPBE	Laporan Hasil Impelementasi						Diskominfo & Setda
2.3	Evaluasi Manajemen SPBE	Laporan Hasil Evaluasi						Diskominfo & Setda
2.4	Tindaklanjut Hasil Manajemen SPBE	Evaluasi Laporan dan Hasil Tindak Lanjut						Diskominfo & Seluruh PD

Indikator 21 : Penerapan Manajemen Risiko SPBE

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	2023	2024	2025	2026	2027
2	Manajemen							
A	Manajemen Risiko SPBE		BAPELIT BANGDA					
1	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE							
2	Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan Manajemen Risiko yang termuat dalam Renstra/RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika							
3	Penerapan manajemen risiko melalui komunikasi dan konsultasi melalui rapat berkala, rapat insidental, FGD							
4	Penetapan konteks risiko SPBE							
5	Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak							
6	Penyusunan evaluasi Risiko SPBE							

7	Penyusunan rencana penangana Risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya								
8	Penyusunan laporan Manajemen Risiko SPBE secara periodik dan insidental								
9	Penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE								
10	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE oleh Dinas Komunikasi dan Informatika								

Indikator 22 : Penerapan Manajemen Keamanan Informasi

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC	2023	2024	2025	2026	2027
2	Manajemen							
	C	Manajemen Keamanan Informasi	Bid. Persandian					
1	Penyusunan dokumen pedoman Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika							
2	Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika							
3	Pelaksanaan program kerja SPBE: menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan risiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika							
4	Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE oleh Dinas Komunikasi dan Informatika							

Indikator 23 : Penerapan Manajemen Data

No.	ProgramKerja	Kegiatan	PIC	2023	2024	2025	2026	2027
2	Manajemen B	Manajemen Data	Bid. Statistik					
1	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Data pada IPPD							
2	Penyusunan Arsitektur Data Tingkat Daerah Kabupaten Bantul							
3	Perencanaan data induk dan data referensi							
4	Pengumpulan data induk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							
5	Pemeriksaan data induk dan data referensi							
6	Penyebarluasan data induk dan data referensi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							
7	Pembaruan Data Induk dan Data Referensi							
8	Penyimpanan data pada Pusat Data Nasional							
9	Perencanaan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data							

Indikator 24 : Penerapan Manajemen Aset TIK

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC	2023	2024	2025	2026	2027
2	Manajemen							
	A	Manajemen Aset TIK	Bidang Telematika					
	1	Menginventarisasi aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur) Dinas Komunikasi dan Informatika						
	2	Penyusunan dokumen perencanaan Aset TIK Dinas Komunikasi dan Informatika						
	3	Penyusunan laporan pengadaan Aset TIK Dinas Komunikasi dan Informatika						
	4	Penyusunan laporan atas penghapusan Aset TIK Dinas Komunikasi dan Informatika						

Indikator 25 : Penerapan Kompetensi SDM

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	2023	2024	2025	2026	2027
2	Manajemen							
	En		BKPSDM					
	E	Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE						
	1	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap jabatan TIK di Kabupaten Purwakarta						
	2	Peta Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika						
	3	Rencana atau laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika						
	4	Analisis kebutuhan pelatihan bagi pejabat TIK Dinas Komunikasi dan Informatika						

Indikator 26 : Penerapan Manajemen Pengetahuan

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	2023	2024	2025	2026	2027
2	Manajemen							
	G	Manajemen Pengetahuan	BAPELIT BANGDA					
	1	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Pengetahuan Dinas Komunikasi dan Informatika						

		Penyusunan dokumen perencanaan manajemen pengetahuan SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika								
2		Pelaksanaan program kerja SPBE: menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan risiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika								
3										

Indikator 27 : Penerapan Manajemen Perubahan

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	2023	2024	2025	2026	2027
2	Manajemen							
	D	Manajemen Perubahan SPBE	Bid. Telematika					
	1	Penyusunan Log Manajemen Perubahan pada unit kerja Pusat Data dan Informatika						
	2	Penyusunan SOP manajemen perubahan SPBE						

Indikator 28 : Penerapan Manajemen Layanan SPBE

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	2023	2024	2025	2026	2027
2	Manajemen							
	B	Manajemen Layanan SPBE						
	1	Penyediaan platform layanan perizinan online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BPMPTSP					
	2	Penyediaan platform layanan kepegawaian online Badan Kepegawaian Daerah	BKPSDM					
	3	Penyediaan platform pengaduan dan pelaporan layanan Rumah Sakit Umum Daerah	RSUD BAYU ASIH					
	4	Pengelolaan platform pelayanan dan pengaduan online	DISKOMINFO					

Program/ Kegiatan Aspek 3 Layanan SPBE Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel III.3. Kegiatan mencakup:

- 3.1 Integrasi dan Sinkronisasi Layanan Publik
- 3.2 Integrasi dan Sinkronisasi Layanan Administrasi Pemerintahan
- 3.3 Evaluasi dan Optimasi Layanan Publik
- 3.4 Evaluasi dan Optimasi Layanan Administrasi Pemerintahan

Program/ Kegiatan Aspek 4 Infrastruktur SPBE Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel III.4. Kegiatan mencakup:

- 4.1 Perencanaan dan Peningkatan Kapasitas TIK
- 4.2 Pemanfaatan Teknologi Mobile dan IOT
- 4.3 Optimasi Sistem Penghubung Layanan Internal
- 4.4 Optimasi Sistem Penghubung Layanan Eksternal

Program/ Kegiatan Aspek 5 Aplikasi SPBE Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel III.5. Kegiatan mencakup:

- 5.1 Optimasi & Integrasi Master Data
- 5.2 Optimasi & Integrasi User Management
- 5.3 Optimasi & Integrasi Portal Aplikasi (Super App)
- 5.4 Melanjutkan Pendaftaran Aplikasi ke Kemenkominfo
- 5.5 Optimasi & Integrasi Aplikasi dengan Layanan IP
- 5.6 Optimasi & Integrasi Aplikasi dengan Layanan PD lainnya

Program/ Kegiatan Aspek 6 Keamanan SPBE Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel III.6. Kegiatan mencakup:

- 6.1 Perluasan implementasi Standar Keamanan SPBE
- 6.2 Penguatan SPBE Terintegrasi

Program/ Kegiatan Aspek 7 Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel III.7. Kegiatan mencakup:

- 7.1 Pembentukan Tim Audit Internal
- 7.2 Pelaksanaan Audit internal TIK

secara berselang-seling setiap tahun.

Audit dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal

- 7.3 Pelaksanaan Audit eksternal TIK
- 7.4 Tindak lanjut Hasil Audit TIK

Tabel III.3 Program Kegiatan Aspek 3 Layanan SPBE Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 - 2027

No	Uraian Program/ Kegiatan	Keluaran	Tahun					Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027	
3	Layanan SPBE Kabupaten Purwakarta							
3.1	Integrasi dan Sinkronisasi Layanan Publik	Layanan Terintegrasi						Diskominfo
3.2	Integrasi dan Sinkronisasi Layanan Administrasi	Layanan Terintegrasi						Diskominfo
3.3	Evaluasi dan Optimasi Publik	Layanan Terintegrasi						Diskominfo
3.4	Evaluasi dan Optimasi Layanan Administrasi Pemerintahan	Layanan Terintegrasi						Diskominfo

Tabel III.4 Program Kegiatan Aspek 4 Infrastruktur SPBE Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 - 2027

No	Uraian Program/ Kegiatan	Keluaran	Tahun					Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027	
4	Infrastruktur SPBE Kabupaten Purwakarta							
4.1	Perencanaan dan Peningkatan Kapasitas TIK	Dokumen Rencana Kapasitas TIK						Diskominfo
4.2	Pemanfaatan Teknologi Mobile dan IOT	Perangkat TIK						Diskominfo
4.3	Optimasi Sistem Penghubung Layanan Internal	SPL-Kabupaten Purwakarta						Diskominfo
4.4	Optimasi Sistem Penghubung Layanan Eksternal	SPL-IP&PD						Diskominfo

Tabel III.5 Program Kegiatan Aspek 5 Aplikasi SPBE Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 - 2027

No	Uraian Program/ Kegiatan	Keluaran	Tahun					Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027	
5	Aplikasi SPBE Kota Bandung							
5.1	Optimasi & Integrasi Master Data	Master Data Terintegrasi					Diskominfo & PD terkait	
5.2	Optimasi & Integrasi User Management	User Management Terintegrasi					Diskominfo & PD terkait	
5.3	Optimasi & Integrasi Portal Aplikasi (Super App)	Super App Kota Bandung					Diskominfo & PD terkait	
5.4	Melanjutkan Pendaftaran Aplikasi ke Kemenkominfo	Tanda Daftar Aplikasi					Diskominfo	
5.5	Optimasi & Integrasi Aplikasi dengan Layanan IP	Aplikasi Terintegrasi					Diskominfo & PD terkait	
5.6	Optimasi & Integrasi Aplikasi dengan Layanan PD lainnya	Aplikasi Terintegrasi					Diskominfo & PD terkait	

Tabel III.6 Program Kegiatan Aspek 6 Keamanan SPBE Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 - 2027

No	Uraian Program / Kegiatan	Keluaran	Tahun						Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027		
6	Keamanan SPBE Kota Bandung								
6.1	Perluasan implementasi Standar Keamanan SPB	Dokumen Keamanan						Diskominfo & PD terkait	
6.2	Pengamanan SPBE Terintegrasi	Dokumen Keamanan						Diskominfo & PD terkait	

Tabel III.7 Program Kegiatan Aspek 7 Audit teknologi SPBE Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 - 2027

No	Uraian Program / Kegiatan	Keluaran	Tahun dan Anggaran (Juta)						Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027		
7.1	Pembentukan Tim Audit Internal	SP Tim Audit						Inspektorat, Diskominfo dan Perangkat Daerah	
7.2	Pelaksanaan Audit Internal TIK	Dokumen Audit						Tim Auditor Internal	
7.2.1	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur	Dokumen Audit						Tim Auditor Internal	
7.2.1.1	Pelaksanaan Audit Internal Pusat Data	Dokumen Audit						Tim Auditor Internal	

7.2.3.3	Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Aplikasi TPP	Dokumen Audit							Tim Auditor Internal
7.3	Pelaksanaan Audit Eksternal TIK	Dokumen Audit							Auditor Eksternal
7.3.2	Pelaksanaan Audit Eksternal Aplikasi	Dokumen Audit				30			Auditor Eksternal
7.3.2.1	Pelaksanaan Audit Eksternal Aplikasi MPP MADUKARA	Dokumen Audit				30			Auditor Eksternal
	Pelaksanaan Audit Eksternal Keamanan	Dokumen Audit			100	100	100		Auditor Eksternal
		Dokumen Audit			25	25	25		Auditor Eksternal
					25	25	25		Auditor Eksternal
					25	25	25		Auditor Eksternal
					25	25	25		Auditor Eksternal
7.4	Tindak Lanjut Hasil Audit	Dokumen Audit			100	75	50		Inspektorat, Diskominfo dan Perangkat Daerah

Tabel III.3 Program Kegiatan Aspek 3 Layanan SPBE Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 - 2027

No	Uraian Program/ Kegiatan	Keluaran	Tahun					Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027	
3	Layanan SPBE Kabupaten Purwakarta							
3.1	Integrasi dan Sinkronisasi Layanan Publik	Layanan Terintegrasi						Diskominfo
3.2	Integrasi dan Sinkronisasi Layanan Administrasi	Layanan Terintegrasi						Diskominfo
3.3	Evaluasi dan Optimasi Publik	Layanan Terintegrasi						Diskominfo
3.4	Evaluasi dan Optimasi Layanan Administrasi Pemerintahan	Layanan Terintegrasi						Diskominfo

Tabel III.4 Program Kegiatan Aspek 4 Infrastruktur SPBE Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 - 2027

No	Uraian Program/ Kegiatan	Keluaran	Tahun					Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027	
4	Infrastruktur SPBE Kabupaten Purwakarta							
4.1	Perencanaan dan Peningkatan Kapasitas TIK	Dokumen Rencana Kapasitas TIK						Diskominfo
4.2	Pemanfaatan Teknologi Mobile dan IOT	Perangkat TIK						Diskominfo
4.3	Optimasi Sistem Penghubung Layanan Internal	SPL-Kabupaten Purwakarta						Diskominfo
4.4	Optimasi Sistem Penghubung Layanan Eksternal	SPL-IP&PD						Diskominfo

Tabel III.5 Program Kegiatan Aspek 5 Aplikasi SPBE Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 - 2027

No	Uraian Program/ Kegiatan	Keluaran	Tahun					Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027	
5	Aplikasi SPBE Kota Bandung							
5.1	Optimasi & Integrasi Master Data	Master Data Terintegrasi						Diskominfo & PD terkait
5.2	Optimasi & Integrasi User Management	User Management Terintegrasi						Diskominfo & PD terkait
5.3	Optimasi & Integrasi Portal Aplikasi (Super App)	Super App Kota Bandung						Diskominfo & PD terkait
5.4	Melanjutkan Pendaftaran Aplikasi ke Kemenkominfo	Tanda Daftar Aplikasi						Diskominfo
5.5	Optimasi & Integrasi Aplikasi dengan Layanan IP	Aplikasi Terintegrasi						Diskominfo & PD terkait
5.6	Optimasi & Integrasi Aplikasi dengan Layanan PD lainnya	Aplikasi Terintegrasi						Diskominfo & PD terkait

Tabel III.6 Program Kegiatan Aspek 6 Keamanan SPBE Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 - 2027

No	Uraian Program/ Kegiatan	Keluaran	Tahun					Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027	
6	Keamanan SPBE Kota Bandung							
6.1	Perluasan implementasi Standar Keamanan SPB	Dokumen Keamanan						Diskominfo & PD terkait
6.2	Pengamanan SPBE Terintegrasi	Dokumen Keamanan						Diskominfo & PD terkait

Tabel III.7 Program Kegiatan Aspek 7 Audit teknologi SPBE Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 - 2027

No	Uraian Program/ Kegiatan	Keluaran	Tahun dan Anggaran (Juta)					Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027	
7.1	Pembentukan Tim Audit Internal	SP Tim Audit						Inspektorat, Diskominfo dan Perangkat Daerah
7.2	Pelaksanaan Audit Internal TIK	Dokumen Audit						Tim Auditor Internal
7.2.1	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur	Dokumen Audit						Tim Auditor Internal
7.2.1.1	Pelaksanaan Audit Internal Pusat Data	Dokumen Audit						Tim Auditor Internal

7.2.3.3	Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Aplikasi TPP	Dokumen Audit						Tim Auditor Internal	
7.3	Pelaksanaan Audit Eksternal TIK	Dokumen Audit						Auditor Eksternal	
7.3.2	Pelaksanaan Audit Eksternal Aplikasi	Dokumen Audit				30		Auditor Eksternal	
7.3.2.1	Pelaksanaan Audit Eksternal Aplikasi MPP MADUKARA	Dokumen Audit				30		Auditor Eksternal	
	Pelaksanaan Audit Eksternal Keamanan	Dokumen Audit				100	100	Auditor Eksternal	
		Dokumen Audit				25	25	Auditor Eksternal	
						25	25	Auditor Eksternal	
						25	25	Auditor Eksternal	
						25	25	Auditor Eksternal	
7.4	Tindak Lanjut Hasil Audit	Dokumen Audit				100	75	50	Inspektorat, Diskominfo dan Perangkat Daerah

B. Indikator SPBE Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 - 2027

Sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan SPBE Kabupaten Purwakarta, ditetapkan target index SPBE seperti pada tabel III.8.

Tabel III.8 Target Index SPBE Kabupaten Purwakarta tahun 2023 - 2027

Tahun	Target Index SPBE
2023	3,20
2024	3,30
2025	3,40
2026	3,50
2027	3,60

Demikianlah Peta Rencana SPBE Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 - 2027, semoga dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan harapan dalam mewujudkan layanan yang prima kepada masyarakat dalam mewujudkan *Purwakarta Smart City*.

